

**SKRIPSI**  
**HAK DAN KEBEBASAN ATAS ORIENTASI SEKSUAL**  
**DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

**RIZKANARIF**

**1510111007**

**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM TATA NEGARA ( PK V )**



**Pembimbing :**

**Arfiani, S.H., M.H**

**Henny Andriani, S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ANDALAS**  
**PADANG**

**2020**

## **HAK DAN KEBABASAN ATAS ORIENTASI SEKSUAL DALAM PERPEKTIF DAN BATASAN HAK ASASI MANUSIA**

(Rizkan Arif, 1510111007, Fakultas Hukum Universitas Andalas, PK V (Hukum Tata Negara) 61 Halaman, 2019)

### **ABSTRAK**

Fenomena Orientasi Seksual Menyimpang seperti Homoseksual dan Biseksual akhir-akhir ini mulai mengemuka di Indonesia, mulai dari peristiwa pernikahan sejenis di beberapa daerah sampai tuntutan pelaku homoseksual dan biseksual yang tergabung suatu kelompok tertentu agar mendapatkan wadah hukum di Indonesia agar perilaku tersebut dilegalkan. Disorientasi seksual itu sendiri bersifat dalam keadaan tertarik kepada orang dari jenis kelamin yang sama (homoseksual) ataupun juga tertarik dengan jenis kelamin pria maupun wanita disebut dengan (biseksual). Penerimaan masyarakat terhadap kelompok berorientasi homoseksual dan biseksual masih kontroversial. Ketika ada laki-laki yang orientasi seksualnya terhadap laki-laki dan perempuan terhadap perempuan atau juga disebut sesama jenis masyarakat menganggap hal tersebut tidak wajar karena sudah jelas dalam aturan agama dan pemerintah yang diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana hak dan kebebasan atas orientasi seksual dalam perpektif dan batasan hak asasi manusia. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana hak dan kebebasan atas orientasi seksual dalam perspektif dan batasan Hak Asasi Manusia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, menggunakan jenis data primer, data sekunder, dan data tersier, sumber data didapat penulis dari penelitian kepustakaan, dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi. Dari hasil penelitian, hukum Indonesia mengakui bahwa adanya penegakan Hak Asasi Manusia yang disertai pembatasan bahwa setiap orang yang memiliki Hak Asasi Manusia juga harus menghormati Hak Asasi Manusia orang lain, mengormati pembatasan yang ditentukan oleh Undang-Undang, memenuhi persyaratan moral, etika, tata tertib kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, nilai-nilai agama, serta menjaga keamanan dan ketertiban umum masyarakat demokratis.